



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSFIZAL MUSA
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 8157

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.940.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m²/126 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/21 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m²/30 m² di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 369.350.000

1. MOBIL, GRAND NEW KIJANG INNOVA MINIBUS / V MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 70.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 130.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 38.060.697

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.547.910.697

III. HUTANG

Rp. 86.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.461.910.697

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.